



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI AMPUAN LUMPO

Jln.Raya Ampuan Lumpo

Kode Pos 25651

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/04/KPTS/ WN-AL/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI AMPUAN LUMPO KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPUN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa pemerintah Nagari Ampun Lumpo berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Ampuan Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

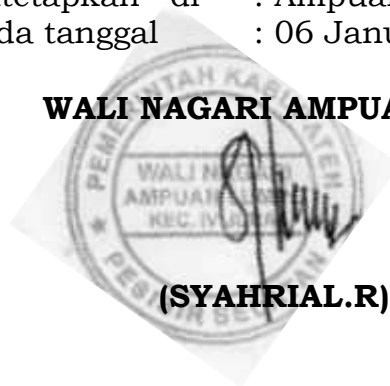
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Ampuan Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ;
1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ang terkait dengan program/kegiatan
 4. sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. kordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster

- KETIGA : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
 5. Bidang Hubungan Antar Lemabaga Klaster V
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 06 Januari 2022

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



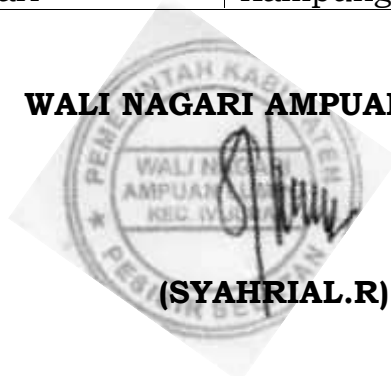
(SYAHRIAL.R)

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo
 Nomor : 140/04/KPTS/WN-AL/I/2022
 Tanggal : 06 Januari 2022
 Tentang : PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI AMPUAN
 LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

**PENGURUS FORUM ANAK NGARI AMPUAN LUMPO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	SYAHRIAL.R	Wali Nagari Ampuan Lumpo
2.	Pendampingan	1. Evi Afrizal 2. Syafruddin 3. Afrizal	Kampung Ampuan Kampung Ampuan Kampung Ampuan
3.	Ketua Wakil Ketua	1. Syafri Gandi 2. Al Badri	Kampung Ampuan Kampung Salido
4.	Sekretaris	1. Bagas Syahyuti 2. Shelvi Dharmawati Wizona	Kampung Ampuan Kampung Pasar
5.	Bendahara	1. Jesi Oktavia Nusi 2. Ramadarif Arasik	Kampung Ampuan Kampung Rimbo Laweh
6.	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1. Beben Saputra 2. Irfan Abdul Gani 3. Femi Baharnah Sitepu	Kampung Pasar Kampung Pasar Kampung Ampuan
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1. Yetmawati 2. Sari Putri Ramadani 3. Mawardi	Kampung Ampuan Kampung Ampuan Kampung Ampuan
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. Hartina 2. Willa Oktavia 3. Sartika Rahmadhani	Kampung Ampuan Kampung Pasar Kampung Ampuan
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. Putri Sejati 2. Banyu Jaya Kusuma 3. Alvanita Febe	Kampung Pasar Kampung Ampuan Kampung Ampuan
	e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1. Fajrul Irsyad 2. Rido Ramadhan 3. Sofia Wulandari	Kampung Pasar Kampung Ampuan Kampung Ampuan

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO


(SYAHRIAL.R)

